



MEMBANGUN KINERJA PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA

Ade Solihin^{1*}, Diding Bajuri², Kania Agustina³

⁽¹⁾Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Administrasi, Universitas Majalengka, Jawa Barat, Indonesia

⁽²⁾⁽³⁾Dosen Pascasarjana Ilmu Administrasi, Universitas Majalengka, Jawa Barat, Indonesia

e-mail korespondensi : -

Disubmit Desember 2021 , diterima Januari 2022 , diterbitkan Februari 2022

Submitted December 2021, *Accepted* January 2022 , *Published* February 2022

Penulis koresponden



Jurnal **DIALOGIKA**
diterbitkan oleh
Program Pascasarjana
Administrasi Publik
Universitas Majalengka

Abstrak

Independent village development can result from good performance of government organizations, so that it will produce effective and quality village development. This study analyzes the influence of government organizational performance factors on the effectiveness of village development. The method used is descriptive quantitative with primary and secondary data collection. The population of this research is elements of village government officials who are in 5 villages with the sampling technique carried out by total sampling of 64 village officials. The results of the descriptive research show that village development is largely determined by the professional attitude of the apparatus in order to realize a performance-based budget to achieve effective village development. The results of the verification research show that organizational performance has a significant influence on the effectiveness of village development.

Keywords: Performance; Effectiveness; Development; Village.

Abstrak

Pembangunan desa yang mandiri dapat dihasilkan dari kinerja organisasi pemerintah yang baik, sehingga akan menghasilkan pembangunan desa yang efektif dan berkualitas. Penelitian ini menganalisis faktor kinerja organisasi pemerintah pengaruhnya terhadap efektivitas pembangunan desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pengambilan data dilakukan secara primer dan sekunder. Adapun populasi penelitian ini adalah unsur aparat pemerintahan desa yang berada di 5 desa dengan teknik pengambilan sampel dilakukan secara total sampling terhadap 64 aparat desa. Hasil penelitian secara deskriptif befektiahwa pembangunan desa sangat ditentukan oleh sikap profesional para aparatatur dalam rangka mewujudkan anggaran berbasis kinerja untuk mencapai pembangunan desa yang efektif. Hasil penelitian verifikatif menunjukkan bahwa kinerja organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pembangunan desa.

Kata kunci: Kinerja; Efektivitas; Pembangunan; Desa.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana kearah yang lebih baik. Sedangkan tujuan dari pembangunan adalah untuk dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera baik materil maupun spiritual. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut agar sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan, maka dalam pelaksanaannya sangat ditunjang oleh manajemen dan organisasi yang baik, karena dalam manajemen terkandung unsur perencanaan yang terorganisasi dengan baik. Tanpa adanya rencana, maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dalam rangka usaha pencapaian tujuan. Dalam rangka pembangunan desa yang menyeluruh,

terpadu dan terprogram, untuk mencapai sasaran dan tujuannya selain ditunjang oleh manajemen pemerintah desa yang baik, organisasi yang jelas juga sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat desa yang bersangkutan.

Efektifitas pembangunan merupakan suatu ukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehubungan dengan efektifitas pembangunan tersebut maka dukungan dan bantuan dari pemerintah dalam pembangunan desa itu sendiri sangat berarti. Pada hakekatnya pembangunan adalah upaya perbaikan secara terencana dari satu situasi ke situasi lainnya yang dianggap lebih baik (Syaukani, 2004). Efektifitas pembangunan merupakan suatu ukuran bagi tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika sasaran atau tujuan itu tidak sesuai dengan rencana yang telah ditentukan maka pekerjaan itu tidak efektif. Sehubungan dengan efektifitas pembangunan tersebut, maka dukungan dan bantuan dari pemerintah maupun masyarakat dalam pembangunan desa itu sendiri sangat berarti.

Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan pembangunan yang paling menyentuh kehidupan masyarakat di pedesaan. Pembangunan desa harus mulai dengan memperbaiki aparat pelaksana yaitu orang yang merealisasikan rencana dan sanggup serta mampu mewujudkan menjadi manfaat dan kenikmatan bagi orang desa melalui proses ajar yang tepat. Untuk tercapainya pembangunan desa yang merupakan bagian pembangunan yang terpenting bagi pemerintah, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kepala desa sebagai koordinator dan administrator pemerintahan desa.

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu kewenangan karena dibuat oleh sekelompok individu yang mempunyai kekuasaan yang sah dalam sebuah sistem pemerintahan. Keputusan akhir yang telah ditetapkan memiliki sifat yang mengikat bagi para pelayan publik atau public servant untuk melakukan tindakan kedepannya. Kebijakan publik menjadi faktor penting dalam pencapaian penyelenggaraan

pemerintahan yang baik. Hal tersebut bergantung kepada setiap kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan dampak yang dirasakan oleh objek kebijakan tersebut. Sering kali kebijakan publik yang dilaksanakan tidak berpihak kepada rakyat dan justru hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Maka dari itu, kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memiliki keberpihakan kepada rakyat dan memang ditujukan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang berada di tengah-tengah masyarakat.

Pada dasarnya kebijakan publik merupakan suatu rangkaian kegiatan yang umumnya dipikirkan, didesain, dirumuskan, dan diputuskan oleh para pemangku kebijakan. Walaupun dalam suatu siklus kebijakan publik telah dilakukan tetapi fakta di lapangan sering menunjukkan bahwa kebijakan tersebut gagal untuk mencapai sasaran. Kebijakan publik sebagai proses yang krusial seringkali dicampuri oleh unsur-unsur politik kepentingan yang dibawa oleh pihak tertentu, sehingga baik dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan dapat melenceng dari apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu banyak masalah yang timbul dalam masyarakat setiap harinya, Hal tersebut menjadi tugas pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui suatu kebijakan publik, salah satunya adalah tentang masalah pembangunan, baik secara fisik maupun non-fisik.

Pembangunan secara fisik maupun non-fisik sangat penting bagi masyarakat karena keduanya saling mendukung keberhasilan satu dengan yang lainnya. Walaupun pada kenyataannya sering kali terjadi ketimpangan antar keduanya. Ketimpangan ini yang menjadikan efektifitas suatu kebijakan menurun dan dapat menjadi faktor kegagalan suatu kebijakan. Pembangunan memiliki pengertian sebagai proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial yang ditujukan untuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat dan dilaksanakan secara terencana. Sebagai suatu proses tentu pembangunan tidak bisa dilaksanakan secara instan dan harus melalui berbagai tahap yang pada dasarnya memiliki

kemiripan seperti proses kebijakan publik. Pembangunan juga akan selalu berlanjut selama suatu bangsa masih ada dan memiliki tahapan yang pada satu pihak sebagai independensi dan pada pihak lain sebagai bagian dari sesuatu yang tidak akan pernah berakhir (Anggara dan Sumantri, 2016: 21). Oleh karena itu, pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat sesuai dengan potensi yang dimilikinya perlu diawasi pelaksanaan dan kesinambungannya.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa bangsa Indonesia mempunyai tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka diselenggarakan pembangunan nasional yang terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, dan berkesinambungan. Tujuan dari pembangunan nasional tidak lain adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU No. 23 Tahun 2014) tentang Pemerintah Daerah telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh melalui 3 (tiga) jalur, meliputi: Peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, sehingga untuk mengemban misi dimaksud desa memiliki kedudukan dan peranan yang strategis sebagai unit organisasi pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Upaya untuk mewujudkan misi yang dimaksud, Desa biasanya mempunyai Rencana dan Rancangan pembangunan yang bertujuan untuk membangun desa harapannya dapat menjadi desa yang maju dan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menjadikan Desa tidak lagi sebagai

obyek pembangunan, akan tetapi menjadi subyek pembangunan. Selain itu Desa juga mendapatkan hak dan kewajiban untuk mengatur sistem pemerintahannya sendiri.

Keberadaan desa sebagai kesatuan masyarakat terkecil yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus mendapat perlakuan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional mendapat perhatian khusus pada masa Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dengan memasukannya pada konsep Nawacita atau Sembilan Pokok Agenda/Cita-Cita yang menjadi rujukan perumusan visi-misi pemerintahannya. Salah satu poin, yaitu poin ketiga dari Sembilan poin konsep Nawacita disebutkan "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan".

Sasaran Pembangunan Nasional Indonesia yang adil dan merata dapat lebih mudah terwujud apabila pembangunan tersebut berbasis pada pelaksanaan pembangunan di daerah-daerah dan desa-desa. Karena walau bagaimana pun, desa lebih mengetahui dan memahami mengenai karakteristik, permasalahan dan potensi di wilayahnya masing-masing. Penguatan kewenangan kepada desa dan kucuran bantuan pendanaannya harus lebih ditingkatkan sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun demikian, arah pelaksanaan pembangunan oleh desa ini harus tetap tersinkronisasi dan terintegrasi dengan proses pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di atasnya sampai dengan pemerintah pusat.

Untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, selain Pendapatan Asli Desa (PADesa) maka sesuai yang diamanatkan oleh UU No. 6 Tahun 2014 bahwa desa juga mendapatkan Dana Desa (DD) yang diperoleh sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dimana kucuran Dana Desa (DD) itu tidak melewati perantara melainkan langsung ke Desa. Walaupun pada prakteknya, Dana Desa (DD) tersebut disalurkan melalui kabupaten/kota sebagai bentuk pengawasan. Jumlah nominal Dana Desa (DD) berbeda-beda untuk tiap-tiap desa. Alokasi APBN yang sebesar 10%

nanti akan menambah penerimaan desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD) untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Widjaja (2003:169), Pemberdayaan Masyarakat ialah upaya dalam meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga dapat mewujudkan jati diri harkat dan martabat untuk bertahan dan mengembangkan diri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pembangunan pedesaan seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat, karena untuk mewujudkan Kemandirian desa harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas. Masyarakat atau penduduk dalam pemberdayaan masyarakat adalah sasaran yang akan dituju, harapannya dalam upaya peningkatan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah, masyarakat dapat merasakan dampak dari kegiatan tersebut. Besarnya Jumlah penduduk akan berhadapan dengan seberapa cepat kemampuan bertambahnya jumlah alat-alat pemuas kebutuhan serta infrastruktur-infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Widiagma, 2015).

Kucuran Dana Desa sudah berjalan selama 6 (enam) tahun yaitu sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Sudah selayaknya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa harus sudah terasa. Namun demikian, kita sering menemukan keluhan-keluhan dari masyarakat tentang jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa-desa di Majalengka

METODE PENELITIAN

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sampel adalah sebagian dari populasi. Karena ia merupakan bagian dari populasi, tentulah ia harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasinya. Jumlah populasi yang ada pada penelitian ini relatif

kecil, oleh karena itu semua anggota populasi desa di Kecamatan Majalengka dijadikan sampel berjumlah 64 orang, maka metode yang digunakan dalam penarikan sampel adalah metode sampling jenuh atau sensus. Metode sampling jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil.

Tabel 1. Populasi Penelitian

No	Nama Desa	Unsur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparat Desa (Orang)
1	Cibodas	Pemerintah Desa	11
		BPD	5
2	Sidamukti	Pemerintah Desa	11
		BPD	5
3	Kawunghilir	Pemerintah Desa	11
		BPD	5
4	Kulur	Pemerintah Desa	11
		BPD	5
Jumlah			64

Sesuai dengan tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik. Tujuan metode ini adalah untuk memecahkan masalah yang terjadi pada saat sekarang. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini digunakan metode deskriptif dan verifikatif. Sugiyono (2003:11) penelitian deskriptif adalah : "Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih".

Dengan demikian deskriptif analisis bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki secara terperinci untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan masa yang akan datang. Sedangkan metode verifikatif untuk mengetahui dan menganalisis mengenai dugaan keterpengaruhannya antar variabel independen terhadap variabel dependen yang dikaji secara parsial dan simultan.

Menurut Arikunto (2002:7), menyatakan bahwa: Sifat penelitian

verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari suatu hipotesis penelitian yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Jadi, dalam penelitian ini akan di uji kebenaran mengenai pengaruh kinerja pemerintah terhadap efektivitas pembangunan.

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini menggunakan Metode Survei Penjelasan (*Explanatory Survey Method*). Sesuai dengan hipotesis yang diajukan, dalam penelitian akan digunakan telaah statistika yang cocok, untuk itu dalam analisis menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Dalam penelitian ini, menggunakan kuesioner (pernyataan), dan memakai ukuran sampel dari suatu populasi. Dalam hal ini yang ingin diketahui adalah pengaruh kinerja pemerintahan terhadap efektivitas pembangunan.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan metode asosiatif dengan hubungan kausal, karena tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dalam bentuk pengaruh antar variabel melalui pengujian hipotesis. Menurut Sugiono (2004:1) "penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih."

Penelitian ini diawali dengan melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan dimaksudkan untuk mengetahui gejala dan fenomena yang terjadi pada kondisi sebenarnya, yang dikaji secara empiris, normatif dan teoritis. Hasil dari studi pendahuluan dituangkan dalam bentuk identifikasi dan rumusan masalah. Untuk menjawab rumusan masalah, maka peneliti membuat kerangka pemikiran secara teoritis yang menjadi dasar terbentuknya hipotesis penelitian.

Dari identifikasi dan rumusan masalah, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian maka dibuat suatu desain dalam penelitian. Desain penelitian dimaksudkan untuk mempermudah dalam menjelaskan alur penelitian dari awal sampai akhir penelitian. Selain membentuk desain penelitian, juga dibentuk konseptualisasi variabel yang dihasilkan dari kajian-kajian teoritis yang berdasarkan pada variabel penelitian (implementasi kebijakan

pembangunan, koordinasi, kinerja pemerintahan dan efektivitas pembangunan) yang dijabarkan dalam bentuk operasionalisasi variabel.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif, sehingga untuk mengoperasionalkan diperlukan populasi dan sampling. Populasi merupakan unit keseluruhan semua objek/individu yang memiliki karakteristik tertentu; jelas dan lengkap yang akan diteliti. Sedangkan sampel merupakan perwakilan dari populasi yang didasarkan pada teori tertentu. Tujuan populasi dan sampling merupakan sebagai dasar dan landasan penelitian dalam pengumpulan data. Sebelum data diolah, dalam penelitian kuantitatif ada beberapa uji yang harus dilaksanakan.

Salah satu uji yang terpenting adalah uji validitas dan reliabilitas. Hukum yang berlaku dalam pengujian validitas dan reliabilitas, apabila data yang telah terkumpul telah lolos dalam uji validitas dan reliabilitas maka data tersebut dapat dilakukan analisis lebih lanjut, dan sebaliknya jika data yang terkumpul tidak memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas maka harus dilakukan pengecekan terhadap instrumen penelitian. Setelah data berhasil dianalisis maka hasil analisis tersebut dijadikan dasar untuk membuat kesimpulan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Desa Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

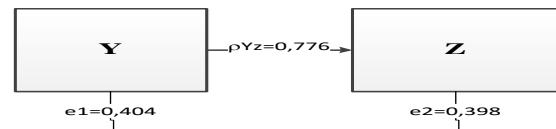
Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Desa menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-

satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

Menurut Sjafrizal (2016:15) perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan fisik. Karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah memerlukan suatu tim perencana yang mempunyai beberapa keahlian dalam ilmu terkait seperti Planologi, Teknik, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Pemerintahan, dan Sosial Budaya. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat Gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. Terwujudnya pembangunan desa yang mandiri, hal ini membutuhkan para aparatur memiliki kinerja yang superior, sehingga dapat bersikap profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Dari hasil penelitian ini, didapat bahwa kinerja pemerintahan yang baik dapat mendukung terhadap pembangunan desa yang efektif, sebagaimana dari hasil empiris yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa dengan efektivitas pembangunan dapat dilihat sebagai berikut :

Model analisis untuk konstruk kedua yaitu hubungan kausalitas yang terjalin antara kinerja instansi pemerintahan desa terhadap efektivitas pembangunan desa, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Analisis Jalur Konstruk Pertama
Sumber : Pengolahan SPSS 20.0, 2020

Keterangan :

Y : kinerja instansi pemerintahan desa

Z : efektivitas pembangunan desa

Dari gambar di atas dapat dilakukan analisis kontribusi pengaruh dan pengujian hipotesis. Kontribusi pengaruh dari variabel kinerja instansi pemerintahan desa terhadap efektivitas pembangunan desa sebesar 0,776 atau 77,60% dan sisanya sebesar 22,40% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Pengujian hipotesisnya yaitu kinerja instansi pemerintahan desa berpengaruh terhadap efektivitas pembangunan desa dilihat dari nilai t-hitung sebesar 14,393 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 2,667. Hasil ini disimpulkan bahwa kinerja instansi pemerintahan desa terbukti secara empiris berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pembangunan desa.

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 8 menyebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Efektivitas pembangunan fisik desa di Kecamatan Majalengka mempunyai beberapa faktor pendukung. Diantaranya sumber dana dari pemerintah sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Suwignjo (1989, h.207) bahwa pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan pemerintah Daerah yang terdiri dari sumbangan dan bantuan pemerintah, sumbangan dan bantuan pemerintah daerah, sebagian dari pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa. Kemudian sumber dana swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat dapat menambah pendapatan keuangan desa.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa dimensi keuangan secara deskriptif termasuk pada kategori tinggi, sementara hambatan efektivitas pembangunan Desa di Kecamatan Majalengka diantaranya

kepuasan masyarakat karena masih ditemukan adanya aspirasi masyarakat yang didasarkan pada hasil musrenbang yang masih belum terealisasi. Meskipun dana pembangunan dinilai baik oleh responden, namun dari aspek kemampuan dalam menampung aspirasi warga dalam proses pembangunan baik pembangunan fisik maupun non fisik masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, khususnya desa di wilayah penelitian yang terdiri atas desa Cibodas, Sidamukti, Kawunghilir dan Kulur sebaiknya lebih menggali potensi desa yang berbasis kearifan local sehingga dapat menambah pendapat asli desa yang pada akhirnya dapat berkontribusi positif dalam pembangunan desa.

Kinerja pemerintahan berpengaruh terhadap efektivitas pembangunan sebesar 77,60% dan sisanya sebesar 22,40% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Hasil penelitian ini mendukung terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh Ari Husnawati (2006) bahwa dalam penelitiannya bahwa dalam hasil analisis Structural Equation Model (SEM) menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap efektivitas pembangunan.

PENUTUP

Kinerja pemerintahan yang diinterpretasikan ke dalam dimensi keuangan, dimensi kepuasan masyarakat, dimensi operasional kegiatan, dimensi kepuasan pegawai dan dimensi kepuasan para pemangku kepentingan menunjukkan nilai rata-rata yang berada pada kategori cukup baik. Fakta ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan belum maksimal, oleh karena itu perlu adanya peningkatan kinerja terutama dalam aspek dimensi kepuasan masyarakat yang dinilai masih belum optimal.

Efektivitas pembangunan fisik desa di Kecamatan Majalengka mempunyai beberapa faktor pendukung. Diantaranya sumber dana dari pemerintah dan hambatan efektivitas pembangunan Desa di Kecamatan Majalengka diantaranya kepuasan masyarakat karena masih

ditemukan adanya aspirasi masyarakat yang didasarkan pada hasil musrenbang yang masih belum sepenuhnya terealisasi. Hasil penelitian verifikatif membuktikan secara empiris bahwa Kinerja pemerintahan berpengaruh terhadap efektivitas pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. G Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Wahab Shilichin, 2012, Analisis Kebijakan, Jakarta : Bumi Aksara.
- Abdul Wahab Shilichin, 2012, Analisis Kebijakan, Jakarta: Bumi Aksara.
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Agus, Dwiyanto, dkk. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)
- Ahmad, Komarudin, 2014. Akuntansi Manajemen. Dasar-Dasar Konsep Biaya dan Pengambilan Keputusan. Jakarta: Rajagrafindo.
- Amirul Hadi dan Haryono, 2005,, Metodologi Penelitian Pendidikan, Pustaka. Setia.
- Anggara, Sahyadan Sumantri, Ii. 2016, Administrasi Pembangunan. Teori dan Praktek, Pustaka Setia, Bandung.
- Bambang Sunggono, 1994, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Jakarta: PT. Karya Unipress.
- Basri, Yuswar Zainul & Mulyadi Subri. 2005. Keuangan Negara dan Analisis. Kebijakan Utang Luar Negeri. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Brynard, Petrus A. 2005. Policy Implementation: Leasson for Service Delivery. (Paper of 27th AAPM Annual Rountable Conference in Zambia).
- Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi. Yogyakarta: Media Presindo.

- Budiharto, Widodo. 2010. Robotika: Teori + Implementasi. Yogyakarta: Andi.
- Dunn, William N. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press.
- Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- George R. Terry, 2006, Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Gie, The Liang. 2000. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta. Liberty.
- Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World. New Jersey: Princeton University Press.
- Handoko, T. Hani Handoko .2003. Manajemen. Edisi2. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Harbani, Pasolong. 2008. Kepemimpinan Birokrasi, Bandung: CV. Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT BumiAskara.
- Hesselbeil, Frances, Goldsmith, Marshall, Beckhard, Richard. 2008. The Organization of the Future. Joey Biss Publishers.
- Keban, T. Yeremias. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep,. Teori dan Isu. Gava Media. Yogyakarta.
- Keban, T. Yeremias. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Gava Media. Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan, UPP STIM. YKPN Yogyakarta.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan. Publik. Yoyakarta: Gava Media.
- Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jilid 1-2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Laksana. 2015. Z Mukarom. Manajemen Pelayanan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
- Lenvine, Charless H., et al.1990. Pyblic Administration: Chalenges, Choices,. Consequences, Illionis: Scot Foreman.
- Lijan, Poltak Sinambela. 2008. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lubis, S.M. Hari & Huseini, Martani. (1987). Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. Implementation and Public. Policy, Scott Foresman and Company, USA.
- Nawawi, Hadari, Kepemimpinan Menurut Islam, Yogyakarta: Gajah Mada.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jilid 1-2. Rineka Cipta.
- Nugroho D, Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia.
- Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti.(2014). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Jakarta: Mandar Maju.
- Siagian Sondang P., 2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, Cetakan. Pertama, PT. Rineka Cipta.
- Siagian, Sondang P. 2001. Peranan Staf dan Manajemen. Penerbit CV. Gunung. Agung. Jakarta.
- Siagian, Sondang., P. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi. Pertama). Jakarta: Binapura Aksara.
- Sjafrizal. 2016. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Suharto, Edi. 2012. Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung. Soeprapto. 2000. Evaluasi Kebijakan. Rineka Cipta. Jakarta.
- Syafii, InuKencana. 2003. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Bandung: PT Bumi Aksara.

- Syaukani, ad all, 2004, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Teguh Yuwono, 2001, Manajemen Otonomi Daerah, Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Puskodak), UNDIP, Semarang.
- Wresniwiro, 2012, Membangun Republik Desa, Jakarta, Visimedia.
- Ahmad Syauqi, 2019. Pengaruh Koordinasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan. ISSN (e) : 2527-564X / ISSN (p) 2621-0746 Website Journal : <http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance>.
- Amelyana Agustin, Sjamsiar Sjamsuddin, Ratih Nur Pratiwi, 2015. Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4, Hal. 735-739.
- Arif Sofianto, 2017. Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. *Matra Pembaruan* 1 (1) (2017): 23-32.
- Ni Putu Mulya Resdyanti, Bandiyah, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti. 2013. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Pengelolaan Potensi Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.
- Safuridar dan Nurlaila Hanum, 2018. Efektivitas Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat. *JURNAL PENELITIAN EKONOMI AKUNTANSI (JENSI)*, VOL. 2, NO. 2, DESEMBER 2018.
- Santiasih, Ni Wayan Supriyanti, Putu Eka Purnamaningsih. 2014. Implementasi Kebijakan Anggaran Dana Desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Studi Kasus Desa Songan B, Kintamani, Bangli)

BIOGRAFI PENULIS

	<p>Ade Solihin merupakan Mahasiswa Pascasarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi, Universitas Majalengka. <i>Email: firstauthor@gmail.com</i></p>
---	---